

## DEWAN TOURISME INDONESIA SEBAGAI PENGGERAK KEPARIWISATAAN NASIONAL TAHUN 1957-1961

**Nita Kurnia Sari**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

E-mail: [ojenita.cheriya@gmail.com](mailto:ojenita.cheriya@gmail.com)

**Corry Liana**

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Surabaya

### **Abstrak**

Keberadaan badan kepariwisataan nasional paska merdeka, memberikan sumbangan yang besar bagi pengembangan kepariwisataan Indonesia. Dewan Tourisme Indonesia (DTI) menjadi badan kepariwisataan nasional yang paling berpengaruh pada masa orde lama. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.H2/2/21 tanggal 8 April 1957, DTI ditunjuk sebagai satu-satunya badan yang bertanggungjawab penuh atas penyelenggaraan kegiatan pariwisata di Indonesia, sejak tahun 1957-1961. DTI melakukan berbagai implementasi untuk menggerakkan kepariwisataan nasional, diantaranya adalah melalui pemanfaatan sarana transportasi dan akomodasi, kerjasama internasional dibidang kepariwisataan, promosi pariwisata Indonesia, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kepariwisataan, sehingga pada tahun 1960an, kegiatan pariwisata di Indonesia mengalami peningkatan.

**Kata kunci:** Pariwisata, DTI, Indonesian Council for Tourism

### **Abstract**

*The existence of national tourism business agency after the independent, gave a big contribution to developed tourism business of Indonesia. Indonesian Council for Tourism (DTI) became the most influential national tourism bussiness agency in orde lama era. Based on the Decree of Minister of Communications No.H2/2/21 date 8 April 1957, DTI was showed directly as the only one agency that having responsibility to organized tourism activity in Indonesia, since 1957-1961. DTI did many implementations to activated national tourism business, which are the beneficent of means of transport and accommodation, International partnerships in tourism business, the promotion of Indonesian tourism, and the improvement of the quality of human resources in tourism business, in order to in 1960 tourism activities in Indonesia were increase.*

**Keywords:** Tourism, DTI, Indonesian Council for Tourism

### **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sebuah kegiatan dinamis yang melibatkan berbagai bidang usaha didalamnya. Sejak dulu, kegiatan wisata banyak diminati oleh orang-orang di berbagai negara di dunia.<sup>1</sup> Negara Inggris, Perancis, Italia, Mesir dan Amerika Serikat, merupakan negara yang telah maju dibidang pariwisata sejak sekitar tahun 1950an.<sup>2</sup> Berbeda dengan Indonesia yang masih dalam

masa mempertahankan kemerdekaan, dan baru merintis kepariwisataan. Indonesia sebagai negara yang dianugrahi keindahan alam dan keragaman budaya, memiliki potensi besar dibidang pariwisata. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah, bahkan mendapat julukan "*The Emerald of Khattulistiwa*". Bangsa Indonesia berusaha menggerakkan kepariwisataan nasional, meskipun negara masih dalam kondisi yang sulit. Sekitar tahun 1946-1960an, Indonesia masih dalam masa mempertahankan

<sup>1</sup> H, Kodyat.1996.*Sejarah dan Perkembangan pariwisata di Indonesia*.Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Hlm 6

<sup>2</sup>James J, Spillane. 1987. *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius, Hlm 37

dan memperjuangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia Perekonomian Indonesia masih belum stabil karena mengalami inflasi besar sejak 1955-1960an.

Pemerintah mulai menggerakkan sektor kepariwisataan nasional sejak tahun 1946. Pemerintah menyadari pentingnya sektor pariwisata, bukan sekedar sebagai usaha yang besar, melainkan suatu usaha yang layak untuk dijalankan dan diutamakan.<sup>3</sup> Pemerintahan yang tidak mendukung pembangunan pariwisata dengan positif, maka seluruh sektor ekonomi tidak akan mencapai hasil maksimal, karena suatu sarana yang efektif telah terbengkalai tidak dimanfaatkan dengan baik.<sup>4</sup> Pemerintah membuktikan kesadaran akan esensi pengembangan sektor pariwisata dengan mendirikan Badan Pusat Hotel Negara (BPHN) pada bulan November tahun 1946, sebagai organisasi perhotelan pertama di Indonesia.

Berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 3 Tahun 1947, Pemerintah menetapkan pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ekonomi negara.<sup>5</sup> Pada tanggal 21 April 1947, berdasarkan penelitian dari para pemikir siasat ekonomi, Wakil Presiden Mohammad Hatta menetapkan pariwisata (hotel dan sumber air panas) sebagai salah satu poyek dari rencana Industrialisasi.<sup>6</sup>

Pada bulan Juli 1947, pemerintah mengubah BPHN menjadi Badan Hotel Negara dan Tourisme (HONET), dengan tugas meneruskan pengelolaan hotel-hotel di Indonesia.<sup>7</sup> HONET juga bertugas mengatur urusan-urusan tempat penginapan, ruangan persidangan dan transportasi bagi para utusan serta delegasi, pada persidangan yang diadakan oleh pemerintah.<sup>8</sup> Pada tahun 1952, pemerintah membubarkan HONET dan membentuk Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme yang bertugas mengusahakan Indonesia sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW). Pada tahun 1953

pemerintah membentuk Serikat Gabungan Hotel dan Turisme Indonesia (SERGAHTI) sebagai pengganti Panitia Inter-Departemental Urusan Tourisme. SERGAHTI bertugas untuk mengusahakan terbukanya Indonesia sebagai daerah tujuan wisata.<sup>9</sup> Badan ini tidak bertahan lama, karena ketidakmampuan pengurusnya untuk menjalankan misi, pengosongan penghuni tetap di hotel dan dalam penetapan tarif hotel.<sup>10</sup>

Pada tanggal 18-24 April tahun 1955, pemerintah mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung. KAA dihadiri 29 wakil dari negara-negara Asia dan Afrika yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan melawan kolonialisme bangsa barat.<sup>11</sup> KAA yang telah diselenggarakan menjadikan bangsa Indonesia semakin dikenal dikancah internasional, sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan asing.

Pada tahun 1955, pemerintah membentuk Yayasan Turisme Indonesia (YTI) yang bertujuan membina dan mengembangkan industri pariwisata secara lebih efektif. YTI mengadakan musyawarah nasional I pada tahun 1957, dan menghasilkan sebuah keputusan yaitu dibentuknya Dewan Tourisme Indonesia (DTI).<sup>12</sup> YTI berubah nama menjadi DTI, dan secara otomatis para pendiri YTI bergabung menjadi pengurus DTI.

Penulisan ini terdiri dari dua rumusan masalah: *pertama*, apa latarbelakang pembentukan Dewan Tourisme Indonesia? *kedua*, bagaimana implementasi-implementasi yang dilakukan Dewan Tourisme Indonesia dalam menggerakkan kepariwisataan nasional tahun 1957-1961?.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (*history method*), yang dilakukan sebagai instrument untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (*history as a past actuality*) menjadi sejarah sebagai kisah (*history as a written*).<sup>13</sup> Metode ini terbagi kedalam empat tahapan yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Pada tahap pertama yaitu *heuristik*, peneliti mencoba untuk mencari dan menemukan sumber yang diperlukan. Proses pencarian ini dilakukan dengan melacak sumber-sumber primer dan sekunder dari Perpustakaan Nasional, Arsip

<sup>3</sup>Sambutan R.M. Suparto. *Arti Tourisme bagi suatu negara dan daerah-daerahnya*. Bulletin Tourisme. Edisi April 1960, Lihat lampiran 9

<sup>4</sup> Nyoman S, Pendet. 1994. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Pradnya Paramitha, Hlm 74

<sup>5</sup> Jurnal Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012. [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) , diakses pada 4 April 2013, pukul 15:20

<sup>6</sup> Sutopo, Yasamihardja. "Membina Pariwisata Harus dengan Pendekatan Ekonomi". Indonesia Tourism News Syndicate: Dokumen No.1/Tahun I : 1-30 April 2004, disahkan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. [www.tourisindo.tripod.com](http://www.tourisindo.tripod.com). Diakses pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:00

<sup>7</sup> Dieny, Ferbianty. 2007. *Sejarah Pariwisata Indonesia*, Institute Teknologi Bandung, Diakses 13 Oktober 2012, pukul 09:34

<sup>8</sup> Sinar Harapan. *Bung Karno dan Pariwisata*. oleh Nyoman S, Pendet. Edisi Sabtu, 1 September 2001, diakses 13 November 2012, pukul 10:04

<sup>9</sup> H, Kodyat., *Op.Cit.*, Hlm 54

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm 56

<sup>12</sup> *Ibid.*, Hlm 62

<sup>13</sup> Materi penyuluhan dalam "Workshop Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; Penelitian karya Ilmiah dan Perekaman Data" tanggal 12-14 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kerjasama dengan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung.

Nasional, Perpustakaan Daerah Jawa Timur, Perpustakaan UNESA, Perpustakaan Medayu Agung dan jurnal-jurnal ilmiah di *website*.

Beberapa sumber primer yang digunakan untuk penelitian ini, *pertama*, Salinan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Darat dan PTT No.H2/3/19 tentang penetapan Dewan Tourisme Indonesia sebagai satu-satunya badan yang bertanggungjawab penuh penyelenggaraan segala kegiatan Tourisme di Indonesia, Jakarta, 14 Maret 1960. *Kedua*, turunan surat dari Departemen Perhubungan Darat dan PTT No.2/2/25 kepada ketua DTI, Sri Sultan Hamengkubuwono IX tentang reformasi keanggotaan DTI. *Ketiga*, Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.51 Tahun 1961 tentang pembentukan panitia penggerak tourisme di Indonesia. Sumber primer tersebut termuat dalam Majalah *Warta Pariwisata*, dan *Bulletin Tourisme* yang diterbitkan sendiri oleh Dewan Tourisme Indonesia. Peneliti juga mencoba mencari informasi melalui beberapa surat kabar sezaman yang terbit di ibu kota yaitu *Harian rakjat* dan *Merdeka*. Kedua surat kabar tersebut banyak memuat berita mengenai kepariwisataan di Indonesia, termasuk iklan-iklan wisata yang dilakukan oleh DTI.

Penelitian juga dilakukan dengan menggali data dari sumber sekunder, seperti buku dan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Sumber sekunder utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (a) *Pengantar Ilmu Pariwisata* karya Oka A. Yoeti; (b) *Sejarah dan Perkembangan pariwisata di Indonesia* karya Kodyat. H; (c) *Pengantar Pariwisata Indonesia* karya M.J. Prajogo; (d) *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan Prospeknya* karya James Spillane.

Pada tahap kritik peneliti melakukan uji kebenaran dengan cara menghubungkan dan membandingkan antara sumber primer dengan sumber sekunder agar diperoleh data yang relevan, sehingga dapat diinterpretasi menjadi sebuah fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Pada tahap berikutnya, peneliti menafsirkan (*Interpret*) apa latar belakang pembentukan DTI, termasuk kepengurusannya dan keputusan-keputusan yang diberlakukan dalam mengatur penyelenggaraan kepariwisataan nasional, serta implementasi apa saja yang dilakukan DTI dalam menggerakkan kepariwisataan nasional selama masa tugas tahun 1957-1961. Penafsiran dilakukan setelah membaca, menghubungkan dan menganalisa baik sumber primer maupun sekunder yang dipakai dalam penelitian.

Tahap akhir yang dilakukan peneliti adalah *historiografi* yaitu merangkai fakta-fakta dan menuliskannya menjadi suatu karya sejarah. Tahap penulisan ini merupakan hasil akhir dari keseluruhan

penelitian yang dilakukan peneliti. Penulisan dilakukan secara kronologis berdasarkan informasi dan data-data yang dikaji pada tahap interpretasi menjadi sebuah hasil yang baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Latarbelakang Pembentukan Dewan Tourisme Indonesia

Sektor pariwisata merupakan salah satu penopang perekonomian yang digerakkan pemerintah sejak masa awal kemerdekaan sampai saat ini. Keinginan menjadikan pariwisata Indonesia menjadi lebih maju, didasarkan pada besarnya potensi yang dimiliki bangsa Indonesia dalam pengembangan sektor kepariwisataan

Berdirinya Dewan Tourisme Indonesia (DTI), merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari badan kepariwisataan yang berdiri sebelumnya, yaitu YTI. YTI berhasil menjalin kerjasama internasional, dengan menjadi anggota dari organisasi kepariwisataan dunia, seperti *Pacific Area Travel Association* (PATA) dan *American Society of Travel Agents* (ASTA) mendorongnya untuk mengajukan diri pada Pemerintah sebagai satu-satunya badan yang membina dan membimbing kepariwisataan di Indonesia.

Menteri Perhubungan Suchyar Tedjasusmana, menjawabnya dengan memberi tantangan pada YTI, untuk menyelenggarakan sebuah kongres kepariwisataan nasional.<sup>14</sup> YTI menjawab tantangan tersebut dengan menyelenggarakan Musyawarah Nasional Tourisme I (Munas Tourisme I), pada tanggal 12-14 Januari 1957. Pendanaan untuk pelaksanaan Munas Torisme I diperoleh dengan mengadakan Pekan Hiburan di daerah Lokasari (dulu Prinsen Park). Munas Tourisme I berhasil digelar di daerah Tugu Bogor, dengan menghasilkan sebuah keputusan penting, tentang pembentukan suatu badan yang menangani kepariwisataan yaitu DTI.

DTI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.H2/2/21 tanggal 8 April 1957, dan mendapat pengakuan secara resmi dari pemerintah untuk membantu mendampingi dalam urusan kepariwisataan. Penggunaan nama "Dewan Tourisme Indonesia" merupakan sebuah kompromi antara YTI dengan organisasi-organisasi kepariwisataan non-YTI, yang hadir pada Munas Tourisme I. Hasil dari kompromi tersebut, yaitu seluruh organisasi kepariwisataan meleburkan diri kedalam DTI, dengan anggota tambahan dari beberapa wakil dari biro lainnya.<sup>15</sup>

DTI mengeluarkan berbagai peraturan dan ketentuan dalam mengatur dan menyelenggarakan kepariwisataan nasional diantaranya melakukan reformasi pengurus DTI

<sup>14</sup> H, Kodyat., *Op.Cit.*, Hlm 60

<sup>15</sup> *Ibid.*, Hlm 62



sekitar tahun 1960, menerapkan pemberian “surat izin kadang kali ke pulau Bali”, Pembatasan izin pendirian perusahaan pariwisata, pengadaan biro perjalanan wisata resmi milik DTI (NITOUR) di bandara dan lain sebagainya.

## 2. Implementasi-implementasi yang dilakukan DTI dalam menggerakkan kepariwisataan nasional tahun 1957-1961

### a. Implementasi DTI dibidang kepariwisataan melalui bidang transportasi dan akomodasi

Kemajuan sarana transportasi dan akomodasi yang pesat, akan memicu perkembangan sektor pariwisata di suatu daerah tujuan wisata. Pemerintah khususnya DTI, yang bertindak sebagai satu-satunya organisasi penanggungjawab segala bentuk kegiatan kepariwisataan di Indonesia, sangat menyadari esensi sarana transportasi dan akomodasi. Perkembangan transportasi darat di Indonesia jauh lebih maju, dibanding dengan transportasi laut dan udara yang baru diretas bangsa Indonesia, kurang lebih satu dekade paska merdeka.

Paska merdeka sarana transportasi darat terus dikembangkan oleh pemerintah, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Sarana transportasi jarak pendek di Ibukota Jakarta dilakukan dengan bajaj dan bemo, sedangkan untuk jarak jauh ditempuh menggunakan motor, mobil ataupun bus. Pada tahun 1960an, Pemerintah kota Jakarta meningkatkan sarana transportasi darat di ibu kota, dengan memberikan tambahan 600 buah bus untuk melayani penumpang dalam kota.<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia juga membeli bus diesel dari Amerika Serikat, untuk menggantikan sejumlah bus DAMRI yang telah tua, di wilayah operasional Jawa dan Sumatra.<sup>17</sup>

Melalui Departemen Perhubungan Darat dan PTT, pemerintah mengusahakan pembelian 70 bus diesel dengan merk internasional “Harvester”, yang dikenal cukup baik dari segi kualitas. Harga pembelian bus tersebut mencapai Rp.16.000.000,-, pembelian tersebut dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Departemen keuangan. Pembelian bus dilakukan karena kebutuhan transportasi jarak jauh yang semakin meningkat, bus DAMRI wilayah operasional jawa barat sampai harus memperpanjang rute perjalanannya, dari Bogor-Tanjung Priok (Jakarta) untuk pulang dan pergi.<sup>18</sup> Penambahan bus dapat memberikan kemudahan bagi para wisatawan yang akan melakukan kegiatan wisata, ke berbagai DTW.

Industri pelayaran di Indonesia sampai sekitar tahun 1950an masih dikuasai oleh Belanda, bahkan sampai pemerintah mendirikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) pada tanggal 28 April 1952. Indonesia memang sudah memiliki PELNI, akan tetapi kegiatan pelayaran antar pulau masih dikuasai oleh KPM (*Koninklijke Paketvaart Maatschappij*), karena PELNI masih tertinggal dari segi kuantitas armadanya. Pada akhir tahun 1957, KPM tidak lagi beroperasi, karena konflik politik Indonesia-Belanda, sehingga PELNI mulai berkembang. PELNI menjalankan pelayaran tidak hanya untuk pelayanan dalam negeri, tetapi juga ke luar negeri, seperti Malaysia, Singapore, Thailand, Myanmar, dan Belanda.

DTI dengan sigap memanfaatkan sarana yang ada untuk kepentingan pariwisata. Pada awal bulan Mei tahun 1960, DTI mengadakan *darmawisata*<sup>19</sup> pertama kali dengan menggunakan kapal laut. Pelaksanaan darmawisata tersebut berkat kerjasama antara Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) Angkatan Laut Republik Indonesia dengan DTI. Darmawisata diadakan untuk menggiatkan pariwisata Indonesia, khususnya untuk pelajar dan pegawai.<sup>20</sup> Demi kelancaran pelaksanaan darmawisata, pemerintah menyediakan dua buah kapal, yaitu “*Djadajat*” dan “*Mangkara*”. DTI melalui NITOUR, juga mengadakan “Tamasya ke Pulau Bali dengan kapal Laut” yang dilakukan pada bulan September 1960.<sup>21</sup>

Indonesia untuk pertama kalinya juga mengadakan “Pameran Terapung Berkeliling” atau “*Floating Fair*”, pada bulan Januari tahun 1961, dengan menggunakan kapal “Tampomas” dari PELNI. “Pameran Terapung Berkeliling” mempertunjukkan beraneka macam usaha perdagangan, pariwisata dan kebudayaan Indonesia ke berbagai tempat di Pasifik.<sup>22</sup> Kapal “Tampomas” yang berukuran 7.150 DTW (*Dead Weight Tons*) tersebut, akan berangkat dengan rute perjalanan Honolulu, Osaka, Yokohama, Hongkong, Filipina dan Malaya.

Tarif pelayaran nasional Indonesia sendiri dibagi menjadi dua kelas, yaitu kelas I dengan harga yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan kelas II. Perbedaan kelas ini dilakukan berdasarkan kualitas pelayanan terhadap para penumpang kapal. Pada Daftar Tarif

<sup>19</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia Online : **dar·ma·wi·sa·ta** (*n*) perjalanan atau kunjungan singkat dng tujuan bersenang-senang dsb; perjalanan yg dilakukan untuk tujuan rekreasi sambil mengenal baik objek wisata dan lingkungannya; menurut para pengurus DTI istilah darmawisata lebih menekankan pada kegiatan wisata dalam negeri.

<sup>20</sup>*Ibid.*, Bulletin Tourisme. *Tahukah Anda Bahwa*. Jakarta : Edisi April 1960

<sup>21</sup>Merdeka. *Nitour Bali Express*. Jakarta : Edisi 5 September 1960

<sup>22</sup> Merdeka. *Kapal “tampomas” Duta keliling Indonesia*. Jakarta : 11 Oktober 1960

<sup>16</sup> Bulletin Tourisme. *Tahukah Anda Bahwa*. Jakarta : Dewan Tourisme Indonesia. Edisi April tahun 1960

<sup>17</sup> Bulletin Tourisme. *Pariwisata Sejangad*. Jakarta : Dewan Tourisme Indonesia. Edisi Oktober tahun 1960

<sup>18</sup> Bulletin Tourisme., *Loc. Cit.*, Edisi oktober 1960

pelayaran Nasional yang dimuat dalam *Bulletin Tourisme* edisi April tahun 1960, diketahui bahwa biaya pelayaran antara kelas I dengan kelas II sebagian besar selisihnya Rp.100,-. Rute pelayarannya sendiri meliputi enam belas perjalanan, yang meliputi beberapa kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Semarang, Surabaya dan Bali.

Presiden Soekarno mendirikan GIA (Garuda Indonesia Airways), bekerjasama dengan perusahaan penerbangan Belanda KLM (*Koninklijke Lutchvaart Maatschappij*). GIA mulai beroperasi pada tanggal 1 Maret 1950 dengan pesawat dari KLM, dan baru mengelola perusahaannya sendiri sebagai satu-satunya perusahaan penerbangan di Indonesia, setelah KLM tidak ada lagi sekitar tahun 1959. Perkembangan GIA yang semakin pesat, berpengaruh besar pada dunia pariwisata Indonesia. DTI memanfaatkan momentum dengan membuka kantor NITOUR, pada tanggal 28 September 1960 di Bandara Kemayoran.<sup>23</sup> Tarif GIA dalam beberapa rute penerbangan dari beberapa kota di Indonesia seperti Medan, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Denpasar dimuat pada *Bulletin Tourisme* Edisi April tahun 1960. Tarif tertinggi ialah tujuan Semarang-Medan dengan biaya sebesar Rp. 3.010,-, sedangkan tarif terendah ialah penerbangan Jakarta-Bandung Rp. 175,- dalam sekali penerbangan.

Perkembangan transportasi yang maju tanpa didukung kemapanan dalam bidang *akomodasi*<sup>24</sup> merupakan sebuah ketimpangan dalam dunia kepariwisataan. Berita "*The Leading hotel in Indonesia*" yang dimuat pada *Bulletin Tourisme* memaparkan beberapa nama hotel berkelas yang telah dimiliki bangsa Indonesia sekitar tahun 1960an, diantaranya adalah di Jakarta terdapat Hotel Duta Indonesia, Hotel Dharma Nirmala, dan Hotel Transaera, di Bandung berdiri Savoy Homann Hotel dan Hotel Astoria, di Yogyakarta Garuda Hotel, di Surakarta Dana Hotel, di Surabaya Simpang Hotel, di Denpasar ada Bali Hotel, Sanur Beach Annex Hotel, Segara Beach Hotel, dan Oka Hotel. Selain hotel-hotel berbintang tersebut, juga masih banyak hotel-hotel *melati*<sup>25</sup> yang berdiri di tempat-tempat wisata di Indonesia.

## **b. Implementasi DTI dalam Hubungan Kerjasama Internasional dibidang Kepariwisataaan**

Kerjasama internasional yang dilakukan bangsa Indonesia di bidang kepariwisataan, merupakan kelanjutan usaha yang telah dirintis oleh YTI. Organisasi kepariwisataan sebelum YTI, hanya bertugas menangani kepariwisataan dalam negeri, tanpa melakukan kerjasama kepariwisataan dengan negara lain. YTI sebagai badan kepariwisataan nasional sebelum DTI dibentuk, telah menancapkan fondasi yang kuat dalam hubungan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan, dengan bergabung menjadi anggota ASTA dan PATA.

Pada masa awal pembentukan DTI tahun 1957-1958, DTI belum banyak melakukan kerjasama internasional. *Bulletin Tourisme* edisi April tahun 1960, memberitakan bahwa Soeganda Sastrasoesirdja (kepala bagian Tourisme Departemen Perhubungan Darat dan PTT), berangkat ke Luar Negeri dalam sebuah perjalanan peninjauan, untuk mempelajari tentang kepariwisataan selama lima bulan. Tempat-tempat yang dikunjungi oleh Soeganda Sastrasoesirdja ialah Bangkok, Hongkong, Tokyo, dan Amerika Serikat.

Pada bulan April tahun 1960, bertempat di "Wisma Pariwisata-Gedung DTI", telah diadakan pembicaraan kerjasama dengan *Intourist Moskow* mengenai pertukaran wisatawan dari Rusia ke Indonesia dan sebaliknya. DTI diwakili oleh Sri Budojo, sedangkan *Intourist Moskow* diwakili oleh Ankudinov selaku *President Intourist Moskow* dan Wakil presiden IUOTO (*International Union of Official Travel Organisations*). Indonesia juga kedatangan tamu dari "*The Aloha Ambassador*", pada bulan Juli tahun 1960. Tamu tersebut adalah K.H.Lee (sebagai ketua), Duke P. Kahanamoku, dan senator Kazuhisa Abe disertai istrinya masing masing, untuk melakukan kunjungannya ke Indonesia dan sebelas negara lainnya guna menyampaikan undangan singgah di Hawaii sebagai tamu mereka. Kunjungan ini dimaksudkan, untuk meningkatkan hubungan baik antar negara di bidang kepariwisataan.<sup>26</sup>

Pada tanggal 18 Agustus 1960, Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Ketua DTI sekaligus Ketua Asian Games Indonesia) bersama Menteri Maladi dan Paku Alam, bertolak ke kota Eternal (Roma), sebagai utusan Indonesia pada Kongres Federasi Asian Games. Hamengkubuwono IX menjabat sebagai ketua Asian Games Indonesia, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya even olahraga terbesar ini, juga untuk kepentingan pariwisata.

<sup>23</sup>Bulletin Tourisme. *Kantor NITOUR di Airport Kemayoran*. Dewan Tourisme Indonesia : Edisi Oktober 1960

<sup>24</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia online arti kata **ako-mo-da-si** n 1 sesuatu yg disediakan untuk memenuhi kebutuhan, msl tempat menginap atau tempat tinggal sementara bagi orang yg bepergian, diakses pada 12 April 2012 pukul 20:31

<sup>25</sup>Hotel Melati merupakan hotel-hotel kecil yang tidak memiliki sertifikat tanda bintang dari pemerintah.

<sup>26</sup>Bulletin Tourisme. *Tahukah Pembatja Bahwa*. Dewan Tourisme Indonesia : Edisi Juli 1960



Tepat pada hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang kelima belas (17 Agustus 1960), Mr. M. Farolan selaku *Commissioner for Tourism of Filipina* mengunjungi Indonesia.<sup>27</sup> Kunjungan tersebut atas undangan Sri Sultan Hamengkubuwono, oleh karena itu Mr. M. Farolan menjadi tamu DTI selama berada di Indonesia. Undangan dilakukan setelah sebelumnya dalam Konferensi negara-negara Asia di Manila, Farolan terpilih sebagai *Coordinator Publicity* dan Propaganda “*Visit Orient Year 1961*” untuk meningkatkan kunjungan wisatawan asing ke Indonesia. Farolan akan mengunjungi G.P.H. Djatikoesoemo Menteri Perhubungan Darat dan PTT, serta Komodor R. Iskandar Menteri Perhubungan Udara, juga melakukan perjalanan ke Bandung dan Bali.<sup>28</sup>

Indonesia melalui DTI juga melakukan kerjasama dengan negara Singapura, hal itu nampak pada kunjungan Tuan Peralta selaku *Tourist Association of Singapore* dan Tuan Pang So Hoo, wartawan dari Nang Yang Post. Peralta dan Pang So Hoo berada di Indonesia tanggal 11-18 Agustus 1960, dan selama itu mereka menjadi tamu DTI. Kunjungan ini dalam rangka menjaga hubungan baik Indonesia-Singapura dalam misi kepariwisataan.

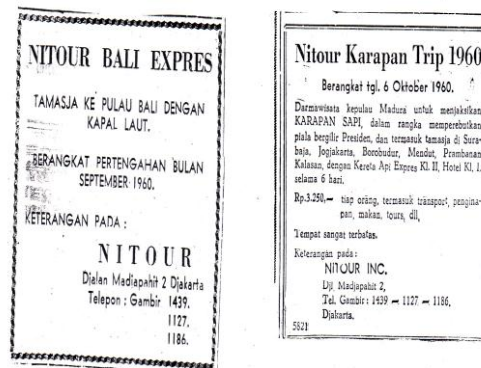
Kerjasama pariwisata melalui pembuatan film juga dilakukan oleh DTI dengan Phil Walker, pengusaha film dari Amerika “*Phil Walker Motion Picture*” dan pembuatan film televisi *tourisme* dengan *TV Dinah Shore National Broadcasting Company* dari Singapura.

Kerjasama tersebut memberi dampak langsung bagi pariwisata Indonesia, karena pada bulan Oktober tahun 1960, sebuah Agen pariwisata Amerika “*Cook*” menawarkan kepada Indonesia untuk mengalirkan 1700 wisatawan ke Indonesia dalam waktu seminggu. Menteri Perhubungan Djatikoesoemo memperkirakan penghasilan yang akan diperoleh pemerintah dari kedatangan wisatawan tersebut, sebesar US \$ 680.000 setiap minggunya.<sup>29</sup> Rencananya wisatawan-wisatawan asing tersebut akan mengunjungi tempat-tempat wisata di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, dan Bali

### c. Implementasi DTI dalam usaha promosi pariwisata Indonesia

DTI dalam mempromosikan pariwisata Indonesia, bekerjasama dengan biro perjalanan yang dimilikinya yaitu NITOUR. NITOUR mengadakan berbagai macam perjalanan wisata ke berbagai wilayah di Indonesia, dan mempromosikan pariwisata Indonesia melalui media massa. DTI juga menjalin sebuah kerjasama yang baik

dengan pers Indonesia, sebagai sarana penyebaran informasi. DTI sangat menyadari, bahwa dalam usaha memajukan pariwisata Indonesia peran pers sangatlah besar. DTI melakukan kampanye sadar pariwisata, dengan menyebarkan brosur-brosur, pamflet-pamflet dan iklan-iklan ke berbagai daerah di Indonesia. Berikut ini adalah contoh iklan yang dipasang DTI pada surat kabar *Merdeka*.



Surat Kabar *Merdeka*, edisi Oktober Tahun 1960

Iklan yang dipasang tidak hanya menawarkan perjalanan wisata ke Bali dan Madura, tetapi ke beberapa DTW lain di Indonesia, seperti Krakatau Trip, Tangkuban Perahu Trip dan lain-lain. Perjalanan wisata yang diadakan NITOUR misalnya “*Bali- Express*” bekerjasama dengan PEPERPU, Departemen Perhubungan Laut DTI, Departemen Perhubungan Darat dan PTT, serta Departemen pelayaran untuk menggiatkan pariwisata tanah air dan meningkatkan kecintaan terhadap lautan Indonesia sebagai negeri bahari. NITOUR tidak hanya mengadakan tour Bali Express, tetapi juga terdapat Prapat Express, Maluku Express, Makasar Express, Krakatau Express, Karapan Trip, dan Tamasya teluk Jakarta. Setiap tour memiliki besar biaya yang berbeda-beda, sesuai dengan lokasi yang dituju serta fasilitas pelayanan yang diberikan. Biaya untuk Krakatau Express kelas I Rp. 310,- dan kelas II Rp. 260,-, sedangkan Bali Express kelas I Rp. 1250,- dan kelas II Rp. 1.000,-.<sup>30</sup>

Pemerintah juga memberikan dukungan luar biasa melalui Departemen Perhubungan Darat dan PTT, dengan mengeluarkan perangko Edisi *tourisme* yang mengangkat tema kebudayaan dan tempat-tempat wisata di Indonesia. Promosi pariwisata melalui pembuatan perangko edisi khusus *tourisme*, merupakan kerjasama DTI dengan Departemen Perhubungan Darat dan PTT. Perangko-perangko yang dikeluarkan pemerintah, bergambar Candi Borobudur, Candi Bali, Danau Toba,

<sup>27</sup> Bulletin *Tourisme.Pariwisata Sejadad*. Dewan *Tourisme Indonesia* : Edisi April 1960

<sup>28</sup> *Ibid.*,

<sup>29</sup> *Merdeka. RI akan dikunjungi 1700 wisatawan AS*. Jakarta : 25 Oktober 1960

<sup>30</sup> Bulletin *Tourisme. Pariwisata Sejadad: Trip ke Krakatau dan Bali*. Dewan *Tourisme Indonesia* : Edisi Juli 1960.

Kawah Tangkuban Perahu, Tari Dayak, Tari Bali, Perahu Ambon, Rumah Toraja, Karapan Sapi, Ngarai Sianok, dan lain sebagainya.

Promosi yang dilakukan DTI juga berupa pengadaan event-event kesenian yang sering digelar di wisma Nusantara, untuk lebih memperkenalkan seni budaya daerah-daerah Indonesia di mata masyarakat. Malam kesenian Maluku, Malam Kesenian Batak, dan berbagai malam kesenian budaya Indonesia lainnya digelar di wisma nusantara, diselenggarakan sesuai dengan kampanye pemerintah untuk memajukan pariwisata. DTI selalu memuat berbagai berita untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, untuk menyaksikan berbagai ritual adat dan kegiatan besar yang dilakukan masyarakat, diberbagai wilayah di Indonesia pada *Bulletin Tourisme* dan *Warta pariwisata*.

DTI juga melakukan kerjasama promosi pariwisata dengan pemerintah Cekoslowakia. Sekitar bulan juli tahun 1960, pemerintah Cekoslowakia menerbitkan buku-buku tentang Indonesia antara lain *Das land der Tausend Inseln* (Negeri dari Seribu Pulau), dan *Schwerter und Dolche Indonesiens* (Pedang-pedang dan keris/patrem/ cundrik/ batik Indonesia). Promosi ke segala arah dan ke berbagai lapisan masyarakat, baik didalam dan diluar negeri terus digerakkan oleh DTI

#### **d. Implementasi DTI dalam usaha peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dibidang Kepariwisataan**

Sumber daya manusia dibidang kepariwisataan memiliki peranan yang dominan, karena industri pariwisata memiliki karakter lebih bersifat jasa, sehingga manusia yang mempunyai kompetensi khusus dibidang pariwisata sangatlah penting. Usaha pengembangan sektor kepariwisataan nasional sangat perlu ditunjang dengan peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat, yang bergerak dibidang ini. Hampir setiap bagian pariwisata memerlukan manusia untuk menggerakkannya, dengan kata lain faktor manusia menentukan eksistensi pariwisata.<sup>31</sup>

Pada tahun 1950an, Kantor Khusus Mobilisasi Pelajar mengirimkan dua orang mahasiswa, yaitu Sutopo Yasamihardja dan Hari Hartono untuk mempelajari ekonomi pariwisata, di *Welthandel Hochschule* di Wina dan *Oekonomische Hochschule* di St. Gallen, Swiss.<sup>32</sup> Pengiriman pelajar yang khusus belajar mengenai kepariwisataan, dilakukan pemerintah agar dapat menggerakkan kepariwisataan nasional menjadi lebih maju. Sekitar bulan Oktober tahun 1958, DTI juga mengirimkan Widjaja Wikrama, dan Kutut

Karmana untuk mengikuti pendidikan perhotelan dan biro perjalanan di Jepang Selama satu setengah tahun. Selain itu, Hanafi Sastradipraja juga dikirim oleh DTI untuk menyelesaikan pendidikan perhotelan di Swiss.<sup>33</sup>

Pada bulan Mei 1959, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendirikan lembaga pendidikan perhotelan pertama milik pemerintah dengan nama Sekolah Kejuruan Perhotelan (SKPH) di Bandung, demi meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia pariwisata.<sup>34</sup> Berdasarkan keterangan biro pendidikan DTI pada tahun 1960, mengirimkan sebanyak 15 orang pelajar ke Jepang, untuk belajar mengenai perhotelan dan kepariwisataan. Pelajar-pelajar tersebut tinggal di Jepang selama dua tahun, dengan ditempatkan pada badan-badan kepariwisataan setempat, sesuai dengan bidang masing-masing. Sebelumnya pelajar-pelajar tersebut telah mendapatkan pendidikan selama dua minggu atau pemberian "*Orientation Course*", di Hotel Duta Indonesia, NITOUR, Wisma Nusantara, Bandara dan lain sebagainya. Pengiriman pelajar ke Jepang dalam rangka pampasan perang Indonesia-Jepang yang dilakukan DTI, bekerjasama dengan Departemen Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia.<sup>35</sup>

Sampai sekitar tahun 1961, terdapat beberapa pelajar lain yang juga belajar mengenai kepariwisataan, diantaranya adalah Rachmat Gunadi, Darmadji Satiman, Armijn Z.K., A.A.A. Putra, dan Peter Suhardjo dikirim ke Swiss.<sup>36</sup> Gembel Sudijono, Machfud Sungkar, Suharko dikirim ke Amerika Serikat, Herman Maktal ke Kanada dan Nyoman S Pedit ke India.<sup>37</sup> Rencananya pelajar-pelajar yang telah dikirim keluar negeri, akan ditempatkan disekolah-sekolah kepariwisataan yang ada, dan dipekerjakan di hotel-hotel ternama di Indonesia.

DTI juga melakukan berbagai kegiatan pendidikan di dalam negeri untuk orang-orang yang bekerja dalam bidang kepariwisataan, seperti diadakannya kursus Aplikasi Pelayanan pariwisata di beberapa kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Bandung dan Jakarta. Memasuki bulan April tahun 1960 kursus Aplikasi pelayanan ini sudah masuk angkatan kedua.<sup>38</sup> Tujuan dari diadakannya kursus aplikasi ini adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan hotel dan restoran, sehingga para wisatawan mendapatkan pelayanan yang memuaskan.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Jurnal "*Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi*", *Loc.Cit.*, Hlm 5

<sup>35</sup> *Ibid.*, *Bulletin Tourisme. Pariwisata Sejadad. Dewan Tourisme Indonesia* : Edisi April 1960

<sup>36</sup> Nyoman S., Pedit., *Loc.Cit.*, *Bung Karno dan Pariwisata*. Hlm 1

<sup>37</sup> *Ibid.*,

<sup>38</sup> *Bulletin Tourisme.*, *Op.Cit.*, *Tahukah anda bahwa*. Edisi April Juli 1960

<sup>31</sup> I Gede, Pitana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET, Hlm 72

<sup>32</sup> Sutopo , Yasamihardja., *Loc.Ci.*, Hlm 1.

Kursus pemandu wisata juga diadakan oleh DTI tepatnya dibuka pada tanggal 20 Juni tahun 1961.<sup>39</sup> Tujuan diadakannya kursus pemandu wisata adalah untuk meningkatkan kompetensi para pemandu wisata, karena keberadaan pemandu wisata sangat berpengaruh dalam terselenggaranya perkembangan pariwisata di Indonesia. Para pemandu wisata tidak hanya bertanggungjawab terhadap para wisatawan saja, tetapi lebih kepada prestis negara dan rakyat. Organisasi-organisasi pariwisata swasta juga mengadakan berbagai even yang mendukung peningkatan kualitas dan kompetensi para pekerja pariwisata, salah satunya dengan mengadakan kontes pramugari di Gelanggang Dagang. Berbagai usaha dilakukan DTI, untuk menggerakkan kemajuan sektor kepariwisataan nasional dari segala arah termasuk melalui pendidikan.

## KESIMPULAN

DTI dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.H2/2/21 tanggal 8 April 1957, karena keberhasilan YTI mengadakan munas *tourisme I* di Tugu Bogor. DTI mendapat tugas dari pemerintah, sebagai satu-satunya badan yang bertanggungjawab penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan segala kegiatan *tourisme* di Indonesia. DTI menjadi badan kepariwisataan nasional yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai salah satu anggota panitia penggerak *tourisme* di Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.51 Tahun 1961.

DTI sebagai penggerak kepariwisataan Indonesia, telah membangun dasar pengembangan kepariwisataan nasional dengan baik. Implementasi-implementasi yang dilakukan DTI dalam menggerakkan kepariwisataan nasional diantaranya ialah *pertama*, pemanfaatan sarana transportasi dan akomodasi, mengadakan kerjasama internasional dibidang kepariwisataan dengan berbagai negara, mempromosikan pariwisata Indonesia ke dalam dan luar negeri, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dibidang kepariwisataan;

Perkembangan pariwisata di Indonesia semakin terlihat pada tahun 1960an, dengan meningkatnya aktivitas kepariwisataan yang terjadi di Indonesia. Pemerintah memperkirakan pemasukan nasional yang berasal dari sektor pariwisata mulai tahun 1960-1965 adalah sebagai berikut:

Tahun	Pemasukan uang (Rp)
1961	226.800.000

<sup>39</sup> Naskah Amanat PJM. PD. Presiden Djuanda pada Pembukaan kursus pembantu pariwisatawan Dewan *Tourisme* Indonesia di hotel Duta Jakarta 20 Juni 1961

1962	1.265.265.000
1963	275.000.000
1964	700.000.000
1965	1.757.500.000
1966	2.042.500.000
1967	2.313.000.000

Tabel Perkiraan pemasukan nasional dari sektor pariwisata (Sumber Surat Kabar Merdeka, edisi 3 Oktober 1960)

Pada masa orde lama, kepariwisataan Indonesia mengalami peningkatan, karena besarnya potensi pariwisata yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, ditunjang dengan keberadaan badan kepariwisataan nasional yang kompeten dalam menggerakkan kepariwisataan nasional.

## SARAN.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah historiografi sejarah khususnya mengenai Sejarah Pariwisata Indonesia. Selain itu, dapat memperkaya dan melengkapi kajian sejarah pariwisata di Indonesia. Keberadaan badan kepariwisataan nasional yang kompeten menjadi sebuah kebutuhan mutlak dalam mengolah dan mengembangkan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Pariwisata Indonesia bisa dijadikan salah satu mesin penghasil devisa yang menjanjikan, jika mendapat perhatian khusus dari pemerintah, karena dapat meningkatkan perekonomian nasional secara lebih merata dari berbagai lapisan ekonomi. Pemerintah, khususnya melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hendaknya lebih mengembangkan lagi kepariwisataan nasional melalui pembangunan berbagai objek wisata dengan promosi yang baik, sehingga pariwisata Indonesia bisa semakin maju di masa yang akan datang. Penelitian kepariwisataan yang sesuai dengan kaedah ilmu pengetahuan, juga perlu untuk dikembangkan demi tercapainya keberhasilan pengembangan pariwisata Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Arsip dan majalah :

- Amanat PJM. PD. Presiden Djuanda pada Pembukaan kursus pembantu pariwisatawan Dewan *Tourisme* Indonesia di hotel Duta Jakarta 20 Juni 1961  
 Bulletin *Tourisme.Pariwisata Sejadad*. Dewan *Tourisme* Indonesia : Edisi April 1960  
 Bulletin *Tourisme. Tahukah Anda Bahwa*. Jakarta : Dewan *Tourisme* Indonesia. Edisi April tahun 1960



Bulletin Tourisme. *Pariwisata Sejadah: Trip ke Krakatau dan Bali*. Dewan Tourisme Indonesia : Edisi Juli 1960.

Bulletin Tourisme. *Tahukah Pembatja Bahwa*. Dewan Tourisme Indonesia : Edisi Juli 1960

Bulletin Tourisme. *Pariwisata Sejadah*. Jakarta :Dewan Tourisme Indonesia. Edisi Oktober tahun 1960

Bulletin Tourisme. *Kantor NITOUR di Airport Kemajoran*. Dewan Tourisme Indonesia : Edisi Oktober 1960

Sambutan R.M. Suparto. *Arti Tourisme bagi suatu negara dan daerah-daerahnya*. Bulletin Tourisme. Edisi April 1960

Merdeka. *Kapal "tampomas" Duta keliling Indonesia*. Jakarta : 11 Oktober 1960

Merdeka. *RI akan dikunjungi 1700 wisatawan AS*. Jakarta : 25 Oktober 1960

Merdeka. *Nitour Bali Express*. Jakarta : Edisi 5 September 1960

Sinar Harapan. *Bung Karno dan Pariwisata*. Oleh Nyoman S, Pendit. Edisi Sabtu, 1 September 2001, diakses pada 13 November 2012, pukul 10:04

#### Jurnal :

Materi penyuluhan dalam "Workshop Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; Penelitian karya Ilmiah dan Perekaman Data" tanggal 12-14 Februari 2008 yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan, Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, kerjasama dengan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung. diakses 22 Desember 2012, pukul 09:00

Dieny, Ferbianty. 2007. *Sejarah Pariwisata Indonesia*, Institute Teknologi Bandung, Diakses 13 Oktober 2012, pukul 09:34

Pendit, Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata sebuah Pengantar*. Jakarta : PT Pradnya Paramitha, Hlm 74

Jurnal Daftar Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, dan Instruksi Presiden Tahun 1946-2012. [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) , diakses pada 4 April 2013, pukul 15:20

Sutopo, Yasamihardja. "Membina Pariwisata Harus dengan Pendekatan Ekonomi". Indonesia Tourism News Syndicate: Dokumen No.1/Tahun I : 1-30 April 2004, disahkan oleh Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. [www.tourisindo.tripod.com](http://www.tourisindo.tripod.com). Diakses pada tanggal 2 April 2013 pukul 12:00

#### Buku :

Damardjati, R. S. 1992. *Istilah-Istilah dunia Pariwisata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita

I Gede, Pitana. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta : CV ANDI OFFSET

Kodyat, H. 1996. *Sejarah dan Perkembangan pariwisata di Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia

Pendit, S. Nyoman. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta : PT Pradnya Paramita

Spillane, James J. 1987. *Ekonomi Pariwisata, sejarah dan Prospeknya*. Yogyakarta : Kanisius

Soedjatmoko, dkk. 1995. *Historiografi Indonesia Sebuah Pengantar*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Prajogo, M. J. 1976. *Pengantar Pariwisata Indonesia*. Jakarta : Ditjen Pariwisata

Yoeti, Oka A. 1983. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung : Angkasa

#### Sumber internet :

[www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id) , diakses September 2012 – April 2013